

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya tidak semua variabel dalam model mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penghindaran pajak (ETR) sebagai indikator penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini secara khusus menyoroti peran koneksi politik serta beberapa karakteristik perusahaan lainnya dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Adapun kesimpulan dari pengujian masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Koneksi politik (PCON): Perusahaan yang mempunyai koneksi politik cenderung membayar tarif pajak yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya kedekatan dengan aktor politik, baik melalui kepemilikan, dewan, atau manajemen, mendorong perusahaan untuk menunjukkan kepatuhan fiskal yang lebih besar. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya tekanan reputasi dan pengawasan yang lebih tinggi dari regulator maupun masyarakat.
2. ROA (Return on Assets): Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas lebih tinggi cenderung membayar pajak yang lebih besar. Hal ini mencerminkan bahwasanya perusahaan yang memperoleh laba besar lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya dan lebih berhati-hati dalam mengambil strategi agresif yang berpotensi merusak reputasi.

3. DER (Debt to Equity Ratio): Perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi cenderung membayar pajak yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan pemanfaatan beban bunga dari utang sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak, yang dikenal sebagai strategi tax shield.
4. MOWN (Kepemilikan Manajerial): Kepemilikan saham oleh manajemen tidak menunjukkan pengaruh yang jelas terhadap tingkat pembayaran pajak. Ini menunjukkan bahwasanya keterlibatan manajemen sebagai pemilik saham tidak serta-merta memengaruhi kebijakan pajak perusahaan.
5. SIZE (Ukuran Perusahaan): Walaupun perusahaan yang mempunyai koneksi politik cenderung lebih besar secara rata-rata, ukuran perusahaan dalam model ini tidak berperan dominan dalam menjelaskan perbedaan tingkat pembayaran pajak.
6. LEV (Leverage): Rasio total utang terhadap total aset perusahaan tidak memberikan indikasi kuat terhadap perilaku pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwasanya ketergantungan terhadap utang tidak selalu diikuti dengan strategi perpajakan tertentu.
7. BIG4 (Audit oleh Kantor Akuntan Publik Bereputasi): Penggunaan auditor dari Kantor Akuntan Publik bereputasi internasional (BIG 4) tidak memberikan perbedaan mencolok dalam hal kepatuhan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwasanya kualitas audit tidak menjadi satu-satunya faktor yang menentukan kebijakan perpajakan perusahaan.

8. BOC (Jumlah Dewan Komisaris): Jumlah anggota dewan komisaris tidak terlihat mempunyai kaitan yang kuat dengan kebijakan pajak yang diterapkan perusahaan.
9. BOD (Jumlah Direksi): Jumlah direktur dalam struktur organisasi tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap tingkat pajak yang dibayarkan, yang menunjukkan bahwasanya kompleksitas struktur eksekutif tidak menjadi faktor utama dalam keputusan pajak.
10. INBOC (Proporsi Komisaris Independen): Terdapat indikasi bahwasanya keberadaan komisaris independen dapat berperan dalam mendorong efisiensi fiskal perusahaan, meskipun peran ini belum terlihat secara konsisten dalam keseluruhan observasi.
11. INBOD (Proporsi Direksi Independen): Keberadaan direktur independen tidak memberikan pengaruh yang menonjol terhadap kebijakan pembayaran pajak perusahaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwasanya koneksi politik dan tingkat profitabilitas merupakan dua faktor yang paling mencolok dalam memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Selain itu, struktur pendanaan melalui utang juga menunjukkan adanya keterkaitan dalam strategi pengelolaan beban pajak. Temuan ini memberikan pemahaman bahwasanya pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh konteks institusional negara. Dalam konteks Indonesia, koneksi politik tampaknya lebih berperan sebagai pengendali eksternal yang meningkatkan kepatuhan fiskal, bukan sebagai

sarana untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai koneksi politik dan perpajakan dengan menunjukkan bahwasanya pengaruh tersebut bersifat kontekstual dan tidak universal.

5.2 Saran Penelitian Selanjutnya

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya:

1. Penyempurnaan Basis Data Koneksi Politik

Meskipun penelitian ini telah menggunakan definisi koneksi politik yang luas berdasarkan klasifikasi PEP (Politically Exposed Person), penelitian selanjutnya dapat meningkatkan akurasi dengan memperkaya sumber data identifikasi koneksi politik. Ini dapat dilakukan melalui pelacakan manual terhadap riwayat jabatan, berita publik, laporan media, atau basis data tambahan seperti laporan integritas dan keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan underreporting koneksi informal yang tidak tercantum secara eksplisit dalam laporan perusahaan.

2. Diversifikasi Pengukuran Penghindaran Pajak

Penggunaan Effective Tax Rate (ETR) sebagai satu-satunya proksi penghindaran pajak dapat membatasi pemahaman terhadap strategi pajak perusahaan. Oleh karena itu, disarankan untuk menambahkan indikator lain seperti Book-Tax Differences (BTD), Cash ETR (CETR), atau keberadaan

afiliasi di negara tax haven. Pendekatan multimetode ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan meningkatkan keandalan hasil analisis.

3. Perluasan Cakupan Sampel

Penelitian ini hanya fokus pada perusahaan terbuka di sektor pertambangan dan konstruksi. Untuk meningkatkan generalisasi hasil, penelitian berikutnya sebaiknya melibatkan perusahaan dari sektor lain, termasuk perusahaan swasta nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian, hasil analisis akan lebih representatif terhadap kondisi perpajakan di Indonesia secara nasional.

4. Penambahan Variabel Penjelas Tambahan

Nilai R^2 dalam model menunjukkan bahwasanya masih terdapat 78% variasi ETR yang belum dapat dijelaskan. Oleh karena itu, disarankan untuk mempertimbangkan variabel tambahan seperti karakteristik CEO dan CFO (latar belakang pendidikan, pengalaman internasional, usia), struktur kompensasi manajemen, kepemilikan institusional, efektivitas komite audit, kualitas pengendalian internal, dan tekanan eksternal seperti eksposur media atau tuntutan sosial. Variabel-variabel ini berpotensi mengisi kekosongan penjelasan dan meningkatkan kekuatan model.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang penting untuk diperhatikan dalam interpretasi hasil dan pengembangan penelitian di masa mendatang.

1. Keterbatasan Kemampuan Model dalam Menjelaskan Variabel Dependen

Model regresi yang digunakan hanya mampu menjelaskan sekitar 22% variasi dalam tingkat penghindaran pajak (ETR). Artinya, masih terdapat sekitar 78% variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya terdapat banyak faktor lain, baik internal (seperti karakteristik manajerial dan sistem kontrol internal) maupun eksternal (seperti tekanan pasar, kebijakan pajak, atau kondisi makroekonomi), yang belum dimasukkan ke dalam model.

2. Keterbatasan cakupan identifikasi koneksi politik secara informal

Meskipun definisi koneksi politik dalam penelitian ini telah mengacu pada kriteria Politically Exposed Person (PEP) yang cukup komprehensif, identifikasi masih sangat bergantung pada data formal dari laporan perusahaan. Hubungan informal seperti kedekatan personal, jaringan sosial-politik, atau afiliasi tidak tercatat secara eksplisit dalam laporan tahunan, sehingga ada kemungkinan under-identification koneksi politik yang dapat berdampak pada validitas pengukuran variabel tersebut.

3. Keterbatasan proksi penghindaran pajak

Penelitian ini hanya menggunakan Effective Tax Rate (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak. Meskipun ETR merupakan indikator umum yang banyak digunakan, ETR mempunyai keterbatasan karena tidak dapat menangkap praktik penghindaran pajak yang lebih kompleks seperti manipulasi transfer pricing, penggunaan entitas di negara tax haven, atau manipulasi perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal.

4. Terbatas pada sektor dan jenis perusahaan tertentu

Ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup perusahaan terbuka di sektor pertambangan dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk sektor-sektor lain, perusahaan swasta nasional, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai struktur kepemilikan dan tata kelola yang berbeda.

5.4 Implikasi Teoritis dan Praktis

5.4.1 Implikasi Teoritis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akademik mengenai hubungan antara koneksi politik dan kepatuhan pajak di Indonesia. Temuan bahwasanya perusahaan dengan koneksi politik cenderung membayar pajak lebih tinggi menunjukkan bahwasanya koneksi tersebut tidak selalu digunakan untuk menghindari kewajiban fiskal, melainkan dapat menjadi alat pengawasan eksternal yang mendorong perusahaan lebih patuh.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengaruh koneksi politik terhadap kepatuhan pajak bersifat kontekstual. Dalam konteks Indonesia, koneksi politik tampak berperan sebagai mekanisme pengendalian, berbeda dengan beberapa temuan di negara lain yang menunjukkan bahwasanya koneksi politik justru digunakan untuk mempermudah penghindaran pajak.
3. Dari sisi variabel kontrol, hanya profitabilitas yang ditemukan konsisten berkorelasi dengan tingkat pembayaran pajak perusahaan. Hal ini menegaskan bahwasanya kinerja keuangan internal, seperti laba, lebih

memengaruhi kepatuhan pajak dibandingkan faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, leverage, kualitas audit, atau struktur tata kelola.

4. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwasanya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, tekanan reputasi dan pengawasan eksternal terhadap perusahaan yang terafiliasi dengan politik dapat menjadi pendorong kepatuhan, bukan penghindaran.

5.4.2 Implikasi Praktis

1. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, hasil ini menunjukkan pentingnya menerapkan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan dengan latar belakang koneksi politik. Karena perusahaan dengan afiliasi politik justru menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi, maka pendekatan pengawasan berbasis profil risiko dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan yang lebih akurat dan efisien.
2. Bagi manajemen perusahaan, temuan ini mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan reputasi jangka panjang. Perusahaan, terutama yang mempunyai keterkaitan dengan aktor politik, perlu mengelola strategi perpajakannya secara hati-hati agar tidak menimbulkan sorotan negatif dari publik maupun regulator.
3. Bagi investor, perusahaan yang menunjukkan tingkat profitabilitas tinggi dan koneksi politik dapat menjadi indikator tata kelola dan kepatuhan fiskal yang relatif lebih baik. Hal ini bisa dijadikan pertimbangan dalam menilai risiko jangka panjang dan integritas perusahaan sebagai objek investasi.